

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Peran BUMDes

1. Konsep BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau lebih populer dengan istilah BUMDes, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

b. Landasan Hukum

UU No. 6/2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan , dimana desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ketiga “*Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan*

¹⁷ Farida Yustiana NFP dan Arif Purabantara, *Modul KKN Tematik Desa Membangun (BUMDESA)*, (Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019) hlm 2.

Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”.¹⁸

Adapun regulasi yang mengatur pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMDes dapat dilihat sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

3) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

tentang desa.

4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adanya payung hukum tersebut merupakan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dalam menuju pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi berbasis partisipasi. Partisipasi penting bagi tujuan

¹⁸ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 8.

pemberdayaan karena merupakan syarat pokok bagi pengembangan ekonomi masyarakat.¹⁹

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita *Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh*. Dengan pemaknaan sebagai berikut: *Pertama, Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Kelima, Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ketujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.*

Dengan pengertian bahwa:

Pertama, BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementerian desa PDPT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (Selanjutnya disebut tradisi berdesa).

¹⁹ Abdul Rahman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm 37.

Ketiga, BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.

Kelima, BUMDes, merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.

Ketujuh, BUMDes, merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.²⁰

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

- 1) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
- 2) Potensi usaha ekonomi desa
- 3) Sumberdaya alam di Desa
- 4) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- 5) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm 8-9.

c. Tujuan Pendirian BUMDes

BUMDes dibentuk dengan berbagai ragam, pembentukan BUMDes memiliki tujuan seperti yang tercantum pada Permendesa No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 7) Membuka lapangan pekerjaan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

²¹*Ibid.*,

- 9) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

d. Prinsip – Prinsip Pendirian BUMDes

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [*vide* pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.²²

Prinsip umum pengelolaan BUMDes. Ada enam (6) prinsip dalam pengelolaan BUMDes menurut Wijaya (2018:135) antara lain:

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

²² Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 26.

- 4) **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif.
- 6) **Berkelanjutan.** Seluruh kegiatan BUMDes harus dapat dikembangkan serta di lestarikan oleh masyarakat Desa dalam wadah BUMDes.²³

e. Mekanisme Pendirian BUMDes secara umum:

- 1) Pembentukan tim persiapan pembentukan BUMDes
- 2) Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa atau narasumber dari luar desanya
- 3) Persiapan penyusunan AD/ART BUMDes beserta draft peraturan desanya
- 4) Persiapan musyawarah desa dalam rangka pembentukan BUMDes.²⁴

²³ Syahrul Efendi, *Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan desa RajaDesa Kecamatan RajaDesa Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019, hlm 329- 330.

²⁴ Farida Yustiana NFP dan Arif Purabantara, *Modul KKN Tematik Desa Membangun (BUMDESA)*, (Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019) hlm 5.

2. Peran BUMDes

a. Teori Peran

Peran adalah suatu bentuk tanggungjawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran (*Role Theory*) adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam dalam kategori sosial.

Menurut Kozier Berbara teori peran terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh oranglain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.
- 2) Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.
- 3) Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.²⁵

²⁵ Halimatus Sakdiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm 15-16.

b. Peran BUMDes

Keberadaan BUMDes berperan sebagai media masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Selain itu BUMDes juga memiliki peran serta penerapannya sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dana peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa, dengan jenis usaha yang diupayakan berupa: a) Pembuatan bisnis sosial berbasis kebutuhan masyarakat, misalnya: instalasi air minum masyarakat desa, listrik desa, lumbung pangan desa dll; b) Pembuatan bisnis jasa perantara pelayanan, misalnya: jasa pembayaran listrik dan pasar desa;
- 2) Pemanfaatan asset desa, dengan jenis usaha yang dapat diciptakan berupa: a) Bisnis persewaan barang, misalnya persewaan alat pesta, persewaan mobil, persewaan gedung pertemuan, rumah took yang dibangun, dimiliki, dan dikelola persewaannya oleh BUMDes;
- 3) Pemberian dukungan bagi usaha produktif masyarakat, usaha yang dapat diupayakan berupa: a) Pembuatan Induk Unit Usaha, misalnya: membangun konsep desa wisata yang terstruktur dan

kolaboratif. b) Pembuatan usaha produksi dan perdagangan barang, misalnya took penyediaan sarana produksi pertanian, pabrik pengolahan hasil pertanian atau perikanan dll. c) Pembuatan bisnis keuangan bisnis keuangan mikro.²⁶

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah salah satu fasilitas kota yang berupa wadah untuk menampung orang (penjual, pembeli dan pengelola) dimana barang dagangannya sebagian besar merupakan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya diperlukan adanya fasilitas-fasilitas penunjang yang mampu mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan pasar, yang hal ini merupakan pertimbangan agar wadah tersebut dapat dipergunakan seaman mungkin bagi pemakainya.

2. Fungsi Pasar

Fungsi pasar dapat diuraikan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378KPTS/1987 tentang 33 Standart Konstruksi Bangunan Indonesia diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasar sebagai tempat distribusi barang industri.

²⁶ Agus Suman dkk, *Ekonomi Lokal Pemberdayaan dan Kolaborasi*, (Malang: UB Press, 2019), hlm 30-31.

Pasar tersebut menyediakan peralatan rumah tangga sebagai pelengkap dapur untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Pasar sebagai tempat pengumpul hasil pertanian

Pasar berfungsi sebagai tempat penjualan hasil pertanian seperti kol, ketela, beras, kentang, dan lain sebagainya.

c. Pasar sebagai tempat jual beli barang dan jasa

Pasar yang berdasarkan fungsi ekonominya merupakan tempat jual beli barang dan jasa. Jasa disini tidak berupa barang. Tetapi berupa pelayanan maupun tenaga ahli.

d. Pasar sebagai tempat menukar barang kebutuhan

Pasar yang berdasarkan fungsinya sbagai tempat pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang, atau disebut *barter*. Proses ini terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli. Serta adanya faktor kebiasaan penjual maupun budaya.

e. Pasar sebagi tempat informasi perdagangan.

Yaitu terjadinya proses perputaran berbagai jenis barang, uang dan jasa dalam pasar. Distribusi barang, jumlah barang, jenis barang yang diperlukan atau beredar dapat diketahui pada infomasi pasar.

f. Sebagai tempat rekreasi

Untuk menarik pengunjung, barang-barang tersebut di tata dan disajikan sedemikian rupa dengan tujuan menarik perhatian pengunjung. Hal ini dikarenakan orang-orang yang datang dipasar tidak sekedar berjalan-jalan sambil melihat barang dagangan saja , namun untuk melepaskan penat dari kesibukan aktivitas sehari-hari.

C. Pengembangan BUMDes

1. Teori Pengembangan

Pengembangan adalah proses, cara perbuatan mengembangkan. Pemerintah selalu berusaha dalam pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.²⁷

Pengertian pengembangan (*development*) menurut Mathis adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberi bekal pengetahuan, perubahan sikap, atau peningkatan keterampilan. Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan oleh individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pengembangan yang cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harua di persiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program

²⁷ Tri Mayasari, *Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*,(Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), hlm 12 .

pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan (*planned change*). Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana).²⁸

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya.²⁹

D. Strategi Pengembangan

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Dalam menjalankan pengoptimalan peran BUMDes dalam pengembangan dan peningkatan terhadap potensi lokal yang ada membutuhkan beberapa strategi. Disini dijelaskan gambaran umum strategi dan pembahasannya.

²⁸ Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 120-21.

²⁹*Ibid.*,

Strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut.³⁰

Menurut Iskandar Wiryokusumo pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesama maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.³¹

Strategi pengembangan adalah usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pinjaman atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku. Strategi pengembangan adalah suatu proses yang meningkatkan efektifitas keorganisasian individu akan

³⁰ Ahmad Sukron Jazillah, *Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Rangka Akselerator Pertumbuhan Ekonomi di Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri tulungagung, 2020), hlm 14.

³¹ *Ibid.*, hlm 15.

pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian. Secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana meliputi suatu system total sepanjang periode tertentu dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi.³²

2. Tahapan Strategi

a. Perumusan Strategi

Langkah pertama yang dilakukan adalah perumusan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, peluang, ancaman, eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan obyektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan.³³

1) Implementasi strategi

Menurut Abdurrahman (2015:337) Implementasi strategi dapat di definisikan sebagai realisasi dari strategi yang telah dipilih. Strategi yang dipilih harus dapat di laksanakan secara konsisten. Untuk itu perlu dibangun suatu struktur organisasi yang cocok,

³²*Ibid.*,

³³ Resti Putri Lestari, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus Pasar Baru Stabat)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), hlm 12-14.

anggaran yang memadai, sistem yang jelas dan kemampuan dalam pengelolaannya.³⁴

2) Evaluasi strategi

Tahap akhir yaitu evaluasi. Evaluasi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi ini menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi strategi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah di capai.³⁵

Diatas merupakan tahapan-tahapan menjalankan strategi secara umum. Disini akan dijelaskan lebih detail tahapan strategi dari sumber yang berbeda, antara lain:

Tahap 1: Persiapan

Tahap ini dimaksudkan sebagai tahap awal atau persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memulai menerapkan pendekatan pengembangan ekonomi lokal. Sebagian besar kegiatan dalam tahap ini terkait dengan penyiapan kelembagaan. Tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu:

³⁴*Ibid.*,

³⁵ Resti Putri Lestari, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus Pasar Baru Stabat)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), hlm 12-14.

- a) Melakukan sosialisasi, penyebarluasan informasi, dan propaganda pendekatan pengembangan ekonomi lokal.
- b) Membentuk organisasi pelaksana pengembangan ekonomi lokal di daerah atau desa.
- c) Melakukan analisis terhadap kondisi pada saat itu.

Tahap II : Perencanaan

Sebelum memulai pada tahap pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal itu sendiri, daerah harus melalui tahap perencanaan. Tahap ini dimaksudkan agar daerah mampu merencanakan dengan baik dan tepat pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal. Langkah yang termasuk dalam tahap ini yaitu:

- a) Mengidentifikasi dan menentukan kluster ekonomi sebagai fokus pengembangan ekonomi lokal
- b) Membentuk dan mengembangkan forum kemitraan multi *stakeholder* pengembangan ekonomi lokal.
- c) Merumuskan dan menyusun strategi, agenda program dan rencana aksi pengembangan ekonomi lokal
- d) Memastikan terpenuhinya kondisi bagi keberhasilan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal.

TAHAP III: Pelaksanaan

Tahap III adalah tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan seluruh strategi dan agenda program pengembangan ekonomi lokal yang telah ditetapkan pada tahap II. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini lebih ditujukan pada hal-hal yang sangat penting dan dianjurkan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dalam proses pelaksanaan agenda program dan kegiatan dari setiap langkah pada tahap ini akan sangat fleksibel baik dari jenis dan volume kegiatan, tergantung pada strategi dan agenda program yang dipilih. Secara umum tahap pelaksanaan terdiri dari lima langkah yaitu:

- a) Meningkatkan dan memperkuat kapasitas *stakeholder* daerah
- b) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya investasi baru dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah
- c) Mengembangkan, memperluas pasar dan melakukan promosi kluster ekonomi terpilih
- d) Memperkuat forum kemitraan pengembangan ekonomi lokal yang telah terbentuk
- e) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan dan ketrampilan produsen atau usaha dan pekerja beserta organisasinya.

- f) Membangun kerjasama antar daerah baik secara horizontal maupun vertikal.

Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi

Walaupun diletakkan pada tahap akhir, kegiatan monitoring dan evaluasi tidak selalu harus diletakkan di akhir kegiatan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya kegiatan pengembangan ekonomi lokal merupakan siklus sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan sepanjang pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal. Tahap ini terdiri dari satu langkah yaitu membangun sistem dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.³⁶

3) Manfaat Strategi

Menurut David Fred R. (2010: 23) menyatakan bahwa manfaat utama dari manajemen strategi adalah membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional.³⁷

³⁶Qori Rusdiana, *Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal sebagai Pilar Perekonomian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, (Tulungagung:IAIN Tulungagung), hlm 37-40.

³⁷ Syahrul Efendi, *Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan desa RajaDesa Kecamatan RajaDesa Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019, hlm 329.

E. Strategi Pengembangan BUMDes terhadap Potensi Lokal

1. Strategi Pengembangan BUMDes

Dalam menerapkan strategi setiap BUMDes pastinya memiliki strategi masing-masing dalam mengembangkan organisasinya maupun potensinya. Disini terdapat berbagai strategi yang biasa digunakan pihak BUMDes secara umum:

a. Pengertian *Capacity Building*

Pengertian *Capacity Building*, Menurut Keban dalam bukunya yang berjudul “*Good Governance*” dan “*Capacity Building’s sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian*” mengatakan bahwa *capacity building* adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja.³⁸

b. Tujuan *Capacity Building*

Tujuan dari *capacity building* yaitu 1) mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. 2) Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah, Daerah dan lainnya. Menurut Kebaen T. Yeremias dalam bukunya yang berjudul *Enam Dimensi Strategis*

³⁸ Keban, Jeremias, *Enam Dimensi ...*, hlm 7.

Administrasi Publik: Konsep, teori dan Isu menyebutkan bahwa tujuan dari *capacity building* (pembangunan kapasitas) dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Secara umum diidentikan pada perwujudan suistainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
- b) Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek: (1) Efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*. (2) Efektifitas berupa kepatasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. (3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. (4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grub, orgnisasi dan sistem.

Dapat kita ketahui bahwa tujuan *capacity building* adalah upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan/pengembangan suatu organisasi untuk meningkatkan daya tanggap individu/pelaku usaha, organisasi atau sistem terhadap perubahan lingkungan yang terjadi sehingga mampu beradaptasi dengan adanya tuntutan perubahan zaman. Upaya dibangun tersebut diolah dari potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan

kualitas individu, organisasi, serta sistem agar dapat bertahan ditengah perubahan lingkungan.³⁹

c. Dimensi *Capacity Building*

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah sebagai berikut:⁴⁰

Tabel 1.1

Dimensi Pembangunan Kapasitas

<i>Dimensions</i>	<i>Focus</i>	<i>Type of Activities</i>
<i>Human Resource (pengembangan SDM)</i>	<i>Supply of profesional and technical personel (kesediaan tenaga teknis dan profesional)</i>	<i>Training, salaries conditions of work, recruitment (pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen)</i>
<i>Organizational strengthening (penguatan organisasi)</i>	<i>Manajemen system to improve performance of specific taks and functions; and microstructures (sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro)</i>	<i>Incentive System , utilizationn of personel, leadership, organizational, culture, communications, manajerial structures (system insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial)</i>

³⁹ Hardjanto Imam, *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006).

⁴⁰ Bambang Santoso Haryono, dkk, *Capacity Building*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm 46.

<i>Institutional reform</i> (reformasi kelembagaan)	<i>Institutions and system</i> , <i>macrostructures</i> (lembaga dan sistem; struktur makro)	<i>Rules of the game for economic and political regimes, policy and legal change, constitutional reform</i> (aturan permainan untuk rezim politik dan perubahan kebijakan reformasi konstitusi)
--	--	--

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa dimensi pembangunan kapasitas meliputi: *pertama*, dimensi pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada kesediaan tenaga teknis dan profesional, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen. *Kedua*, dimensi penguatan organisasi, dengan fokus pada sistem manajemen dalam mengembangkan performansi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro; sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, sistem insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial. *Ketiga* dimensi reformasi kelembagaan dengan fokus lembaga dan sistem; struktur makro, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, aturan permainan untuk rezim politik dan perubahan kebijakan, reformasi konstitusi.

Haryono, dkk merangkum berbagai pendapat ahli tentang dimensi pembangunan kapasitas, yaitu meliputi tiga dimensi diantaranya:⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm 40.

1) Pengembangan *Human Resource* (SDM)

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Mengenai pengertian kapasitas sumber daya manusia, Grindle dalam Haryono menyatakan bahwa “*initiatives to develop human resource generally seek the capacity of individuals to carry out their profesional and technical responsibilities*” (inisiatif untuk mengembangkan SDM secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya).

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

a) Pengertian Pengembangan *Human Resource* (SDM)

Pengembangan SDM adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan, agar pengetahuan, kemampuan,

dan ketrampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.⁴²

b) Tujuan Pengembangan adalah memperbaiki tingkat

Efektivitas kinerja pegawai dalam mencapai hasil yang ditetapkan. Sifat pengembangan adalah pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, perubahan sikap. Pengembangan SDM tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Oleh karena itu, organisasi perlu terus melakukan pengembangan SDM, karena investasi di dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia.

2) Strengthening *organization* (penguatan organisasi)

Pengertian *strengthening organization* (penguatan organisasi), Sebagai salah satu bentuk kehidupan, organisasi terikat dalam suatu proses keberadaan, pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhannya itu, organisasi menghadapi tuntutan-tuntutan besar yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan internal ataupun tuntutan eksternal. Tuntutan eksternal berasal dari perkembangan

⁴² Achmad S. Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 227.

lingkungan yang semakin hari semakin pesat. Adapun tuntutan internal merupakan tuntutan yang berkembang dari dalam organisasi itu sendiri yakni suatu tuntutan perubahan yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya desakan tuntutan dari luar.

a) Fokus Penguatan Organisasi

Fokus perhatian dalam penguatan organisasi menurut Haryono,dkk terletak pada persoalan pemanfaatan personil, bagaimana mendesain struktur manajerial dan persoalan pengembangan jaringan-jaringan atau network.⁴³

(1) Pemanfaatan personel

Salah satu unsur dalam penguatan organisasi adalah pendayagunaan aparatur atau biasa disebut dengan pemanfaatan personel, yaitu menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya atau istilah lainnya *the right man on the right place*. Dengan menerapkan prinsip ini maka akan menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tepat atau menciptakan aparatur yang profesional dalam bidangnya.⁴⁴

(2) Aspek manajerial

Aspek manajerial menyangkut bagaimana pengelolaan organisasi menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang

⁴³ Bambang Santoso Haryono, dkk, *Capacity Building...* hlm 47.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 70.

baik. Prinsip-prinsip manajemen pada umumnya yaitu *planning, organizing, actuating and controlling* (POAC) sehingga pelaksanaan suatu program atau suatu proyek dapat dilaksanakan dengan baik. salah satu aspek terpenting yang merupakan bagian dari penguatan organisasi adalah penerapan aspek manajerial.

(3) Jejaring kerjasama (*network*)

Dalam upaya pengembangan jaringan atau *network* yang merupakan basis dari interaksi sosial dan sah di dalam organisasi. Kemampuan membentuk *network* atau kerjasama antara organisasi, menuntut adanya kemampuan khusus dari organisasi. Terdapat beberapa faktor yang terlihat kritis atas kinerja *network* seperti: kemampuan memastikan partisipasi dari aktor-aktor kunci, kemampuan dari aturan prosedur dan penyediaan keuangan untuk jaringan itu sendiri, alokasi yang tepat tentang tanggungjawab, kewenangan organisasi dalam menunjang koordinasi dan juga yang terpenting adalah stabilitas dari susunan *institutional*.

3) *Institutional reform* (reformasi kelembagaan)

Berkaitan dengan pemahaman akan *institutional capacity*, Willems dalam Haryono, dkk menyatakan:³³ Kapasitas kelembagaan sering dipertimbangkan sebagai konsep yang kabur, samar dan ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan aspek-

aspek yang paling penting dari kapasitas karena semua aspek tersebut terlihat sama pentingnya. Kondisi ini terjadi karena kapasitas lebih menunjukkan hubungan atau keterkaitan diantara aspek daripada lemen-elemen yang terbagi-bagi. Aspek-aspek tersebut menggambarkan perbedaan tingkatan-tingkatan dari kapasitas yang saling bergantung dan perbedaan dari proses kebijakan yang saling berhubungan).⁴⁵

Dalam buku Anneli Milen yang berjudul *Capacity Building*, Dijelaskan bahwa dalam penguatan pengembangan kapasitas dikembangkan berdasarkan analisa yang seksama mengenai apakah kapasitas yang sudah ada, bagaimana kapasitas-kapasitas itu seharusnya dan mengapa ada kelonggaran kapasitas. Sebagaimana kelonggaran kapasitas dan terutama penyebabnya adalah spesifik kontek, strategi-strategi penguatan kapasitas dan langkah-langkahnya perlu dikembangkan pada tiap situasi.⁴⁶

Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

1) Faktor anggaran

⁴⁵ *Ibid*, hlm 82.

⁴⁶ Anneli Milen, *Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: PEMBARUAN PO BOX 1253, 2006), hlm 45-46.

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bias lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelolaan usahapun akan mengalami kemunduran.

2) Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola

Sumber Daya Manusia Pengelola yang dimaksudkan disini antara lain adalah pengurus BUMDes. Pengurus sebagai subjek untuk menggerakkan serta melaksanakan strategi-strategi yang sudah di rencanakan. Disini pengelola juga bisa menjadi faktor Penghambat juga dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal dan banyak terjadi penyelewangan terhadap tanggungjawab dan pasif. Sebaiknya sumber daya pengelola harus aktif dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugasnya.

3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta

Pemberdayaan BUMDes melalui kelompok ekonomi kewirausahaan secara pasrtisipatif adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat,

pemerintah, dan swasta sehingga semua *stakeholder* berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa.

Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan usaha BUMDes akan dapat menumbuh kembangkan usaha secara berkelanjutan.

b. Faktor Pendukung

1) Komitmen Pemerintah

Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah.

Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes

2) Tersedianya Potensi Sumberdaya Alam

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Ada banyak cara dalam mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan asset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki asset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Keberadaan BUMDes sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan pembubaran Bdan Usaha Milik Desa.

Keberadaan peraturan ini diperkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan penggunaan asset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMDes adalah mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁴⁷

F. Strategi Peningkatan Pengunjung Pasar

1. Teori Peningkatan dan pengunjung

a. Peningkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peningkatan mengandung arti menaikkan. Menaikkan dalam artian bahwa segala sesuatu usaha untuk mengangkat sesuatu hal dari yang semula memiliki posisi yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Moeliono seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha untuk mendapatkan kembali ketrampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.

Menurut Adis S. peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Kata peningkatann juga dapat berupa kuantitas

⁴⁷ Ibrahim dkk, *Faktor Pengahambat dan Pendukung Bdan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat*, Jurnal Ilmu-Ilmu Soial dan Humaniora, Vol 21, No.3 Nopember 2019: 349-354, hlm 351-353.

dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu.⁴⁸

b. Pengunjung

World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pengunjung (*visitor*) yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu tempat yang bukan merupakan tempatnya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk pekerjaan yang dibayar oleh tempat yang dikunjungi.

Berdasarkan pengertian diatas, bisa dijelaskan lebih rinci bahwa pengunjung atau wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tempat untuk sementara dan mengeluarkan biaya, untuk melakukan kegiatan wisata.⁴⁹

Bisa disimpulkan bahwa peningkatan pengunjung yaitu usaha atau cara yang telah dilakukan terhadap suatu objek potensi lokal (tempat wisata, pasar dll) yang menghasilkan sebuah kenaikan kualitas maupun kuantitas.

⁴⁸ Yandri Pagappong, *Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Seberang*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015.

⁴⁹ Ruknal Sani Nur Wafa, *Analisis Tingkat Kepuasan Para Pengunjung Objek Wisata Deramland Kecamatan AjiBarang Kabupaten BanyuMas*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), hlm 5.

2. Strategi Peningkatan Pengunjung Pasar

Adapun strategi meningkatkan pengunjung pasar dengan melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar tradisional, di antaranya:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar
- c. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan retribusi
- d. Pengembangan pasar (pemberdayaan pasar dan komunitas, pengembangan dan pembuatan media promosi pasar).⁵⁰

Selain di atas bentuk strategi pengembangan pasar salah satunya adalah revitalisasi. Revitalisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh pasar tradisional dalam persaingan era globalisasi. Banyak pasar modern dengan fasilitas yang memadai akan mengurangi peran pasar tradisional. Menurut Danisworo, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi. Revitalisasi dapat dilaksanakan apabila semua pihak yang terkait saling mendukung baik pihak pemerintah, pedagang hingga pembeli. Aspek

⁵⁰ Putut Wijanarko, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Kutukan dalam Upaya Meningkatkan Minat Pengunjung di kabupaten Blitar*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), hlm 34.

fisik, aspek ekonomi serta aspek sosial menjadi perhatian yang utama dalam melaksanakan revitalisasi.

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi pasar terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Intervensi fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi ini mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan, peningkatan kualitas, kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tenda atau reklame dan ruang terbuka kawasan. Isu lingkungan pun menjadi penting, sehingga sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

2) Rehabilitasi Ekonomi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal, sehingga mampu memberikan nilai tambah kawasan.

3) Rehabilitas Manajemen

Revitalisasi mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban

pedagang, tata cara penempatan dan pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar.

4) Rehabilitasi sosial atau institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik, jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.⁵¹

G. Kesejahteraan Masyarakat

1. Teori Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.⁵²

⁵¹ Dina Apriliana, *Implementasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat Panjerejo Rejotangan Tulungagung*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), hlm24-25.

⁵² Astriana Widyastuti, *Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah 2009*, *Journal Unnes* ISSN 2252-6560, hlm 3.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2013). Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan penyelenggara kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

1) Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

2) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).⁵³

2. Indikator atau Tolak Ukur Masyarakat Sejahtera

Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapainya masyarakat, masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.⁵⁴

Kesejahteraan masyarakat menggambarkan pembangunan ekonomi di suatu negara, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi di negara tersebut akan meningkat, World bank (2000) merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai Indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan ekonomi disebut sebagai *millennium Development Goals (MDGs)*. Yang mana hal tersebut terdiri dari delapan indicator capaian pembangunan yaitu:

⁵³ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol.9 No.2 September 2019, hlm 40.

⁵⁴ Satriawan dkk, *Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Jurusan Tadris IPS, Vol 10, Nomor 2, Desember 2019., hlm 118.

- a. Penghapusan kemiskinan
- b. Perataan pendidikan
- c. Persamaan Gender
- d. Perlawanan terhadap penyakit menular
- e. Penurunan angka kematian anak
- f. Peningkatan kesehatan ibu
- g. Pelestarian lingkungan hidup
- h. Kerjasama global

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat ada delapan yaitu:

- a) Pendapatan
- b) Konsumsi atau pengeluaran keluarga
- c) Keadaan tempat tinggal
- d) Fasilitas tempat tinggal
- e) Kesehatan anggota keluarga
- f) Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan

- g) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- h) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Menurut (Todaro, 124: 2006) melihat bahwa *United Nations Development Index* (HDI) atau bias juga disebut dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Anand & Sen (2000). Menjelaskan paradigma pembangunan manusia UNDP mengandung 4 komponen utama yaitu :

- 1) Produktivitas
- 2) Pemerataan
- 3) Kestinambungan
- 4) Pemberdayaan

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan paparan mengenai kesejahteraan, maka dapat disimpulkan bahwasanya kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik, baik kebutuhan material yang berupa sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan

non material yang berupa pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan lain-lain.⁵⁵

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Aisyah Sabrina dengan judul “*Peran BUMDES Bangoan dalam Pengelolaan Pasar Senggol Guna Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD)*”. Penelitian ini terkesan sama dengan penelitian penulis, namun tetap memiliki perbedaan dari segi pembahasan dan fokus penelitian. Untuk penelitian dari Aisyah Sabrina memfokuskan pada dampak dan pengaruh BUMDes dalam pengelolaan Pasar Senggol hanya terhadap Pendapatan Asli Desa. Sedangkan, penulis memfokuskan pada pengembangan serta peningkatan pengunjung Pasar Senggol yang sudah dikelola oleh BUMDes. Untuk poin dampak, penulis fokus pada dampak kualitas perekonomian desa baik perekonomian pedagang, masyarakat desa Bangoan yang berjualan, kualitas perekonomian desa secara meluas (berada pada lingkup Pasar Senggol).⁵⁶

Untuk penelitian kedua, oleh Intan Ika Pertiwi. Dengan judul “*Etika Bisnis Pedagang Di Pasar Senggol Bangoan Kedungwaru Tulungagung Dalam Perspektif Islam*”. Disini lokasi penelitiannya sama

⁵⁵ Syamsul Arifin, Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm 40-42.

⁵⁶ Aisyah Sabrina Astigianto, *Peran BUMDES Bangoan dalam Pengelolaan Pasar Senggol Guna Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hal. 3.

namun pembahasannya berbeda. Pada skripsi oleh Intan Ika Pertiwi fokus pada penelitian etika bisnis pedagang.⁵⁷

Penelitian sebelumnya oleh Aprianus Jepri dengan judul “*Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui BUMDesa Program Pasar Desa*”. Inti dari pembahasan penelitian ini yaitu membahas mengenai strategi yang digunakan dalam mengelola serta meningkatkan kemandirian ekonomi Program Pasar Desa yaitu terdapat 3 proses (perumusan strategi, penerapan strategi dan pengevaluasian hasil penelitian). Dan poin pentingnya faktor pendukung yang bisa dibilang utama dalam meningkatkan pasar desa yaitu masyarakatnya sendiri.⁵⁸

Penelitian selanjutnya oleh Putut Wijanarko dengan judul penelitian “*Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Kutukan dalam Upaya Meningkatkan Minat Pengunjung di Kabupaten Blitar*”. Strategi yang diterapkan pada Pasar Kutukan yakni salah satunya menerapkan serta mengoptimalkan kebijakan dan program pemerintah dengan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, mengelola keaman dan ketertiban pasar, optimalisasi lahan pasar. Setiap strategi juga memiliki kendala. Pada Pasar Kutukan pun juga ada beberapa

⁵⁷ Intan Ika Pertiwi, “*Etika Bisnis Pedagang Di Pasar Senggol Bangoan Kedungwaru Tulungagung Dalam Perspektif Islam*”. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hlm 1.

⁵⁸ Aprianus Jepri, *Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui BUMDesa Program Pasar Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8 No.4 (2019), hlm.309.

kendala, namun kendala tersebut dapat diantisipasi karena dari awal sudah menyiapkan solusi.⁵⁹

Strategi pengembangan pasar pada penelitian milik (Bani Astiti, Herbasuki Nurcahyanto) yang berjudul "*Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Semarang*" yaitu menerapkan optimalisasi pembangunan dan revitalisasi pasar, pengembangan pasar dengan memanfaatkan potensi dan ciri khas yang dimiliki, pengembangan pasar kerjasama dengan investor, memfasilitasi dan menjamin kemudahan peminjaman modal untuk pedagang, pengembangan pasar melalui promosi.⁶⁰

Strategi yang digunakan pada skripsi Resti Putri Lestari yang berjudul "*Strategi Pengembangan Pasar Traditional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus Pasar Baru Stabat)*" dengan analisis SWOT.⁶¹

"*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Melalui Program Pasar Desa Kalijaga*". Judul penelitian dari Ittihad yang memiliki kesimpulan yaitu

⁵⁹ Putut Wijanarko, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Kutukan dalam Upaya Meningkatkan Minat Pengunjung di Kabupaten Blitar*, (Tulungagung: Juli 2019), hlm 88-98.

⁶⁰ Bani Astiti, Herbasuki Nurcahyanto, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Semarang*, hlm. 8.

⁶¹ Resti Putri Lestari yang, "*Strategi Pengembangan Pasar Traditional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus Pasar Baru Stabat)*", (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm.76.

strategi yang digunakan menggunakan 3 proses yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, Pengevaluasian.

“Pengelolaan Pasar oleh BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, merupakan penelitian dari Nurul Pauziah dimana dalam menjalankan strategi pengelolaan dan pengembangan pasar juga harus memiliki faktor pendukung dari pengelolaan yaitu pemerintah dan fasilitas.⁶²

Penelitian dengan judul *“Strategi Pemberdayaan Dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tulungagung”*. Berisi tentang strategi dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Subjek pelaksanaannya adalah BUMDesa. Strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut terpacu pada kewirausahaan sosial. Strategi tersebut bukan hanya bisa menciptakan penciptaan peluang peningkatan pendapatan saja melainkan juga menyelesaikan berbagai persoalan sosial sekaligus. Kewirausahaan sosial adalah gerakan pemberdayaan ekonomi dengan lebih mengutamakan peran dan partisipasi orang-orang sebagai prosesnya.

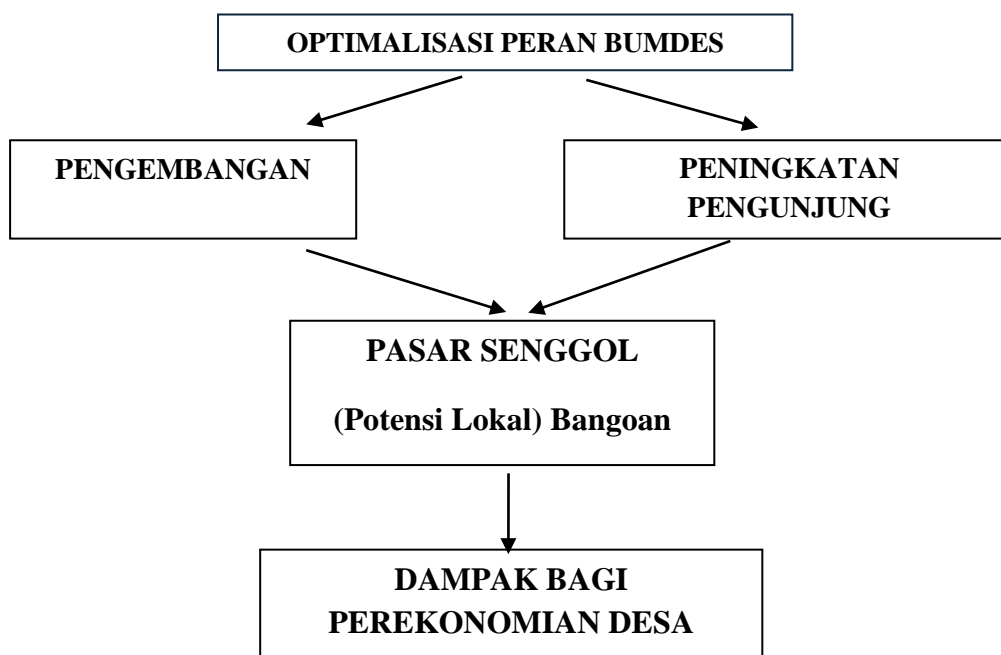
⁶² Nurul Pauziah, *Pengelolaan Pasar oleh BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hlm 1.

Hasilnya, lebih banyak orang terberdaya secara ekonomi karena terlibat dalam aktivitas pemberdayaan.⁶³

I. Kerangka Konseptual

Secara Operasional (digambarkan dengan bentuk kerangka), maka sebagai berikut:

**Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Dan Peningkatan
Pengunjung serta Dampaknya bagi Perekonomian
(Studi Di Pasar Senggol BUMDes Maju Mapan Desa Bangoan Kedungwaru
Tulungagung)**



Untuk memperjelas judul yang ditulis oleh peneliti. Maka Peneliti membuat peta konsep yang disebut juga dengan kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual diatas bahwa difokuskan pada optimalisasi peran BUMDes. Karena BUMDes memiliki tugas yang penting juga

⁶³ Siswahyudianto dan Dedi Suselo, *Strategi Pemberdayaan Dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tulungagung*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 05, Nomor 02, April 2019, hlm 187.

dalam meningkatkan perekonomian yang berkualitas pada wilayah desa. Dari keberadaan BUMDes juga membantu negara sekaligus.

Kali ini yang diteliti yaitu pengembangan dan peningkatan pengunjung terhadap potensi (pasar rakyat) yang ada di suatu desa yaitu di Desa Bangoan, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dari peran BUMDes yang telah dijalankan maka memberikan dampak positif bagi perekonomian di wilayah tersebut. Dan pada akhirnya memperoleh hasil penelitian yaitu dampak dari keberhasilan BUMDes tersebut terhadap kesejahteraan pengurusnya, potensi lokal, dan dampak perekonomian.